

Bab 5 Penutup

5.1 Kesimpulan

Analisa tesis ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan jawaban awal yang telah dirumuskan. Langkah analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dilakukan melalui proses penggambaran kekuatan militer sebuah negara yang ditujukan dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang dihasilkan oleh perubahan lingkungan strategis. Bentuk pengembangan postur pertahanan Indonesia yang tidak merefleksi perubahan lingkungan strategis membuktikan bahwa tidak adanya cara pandang yang *outward-looking* atau landasan berpikir yang tidak mengacu pada situasi eksternal dalam melihat kepentingan, ancaman, dan tantangan atau masih bersifat *inward-looking*.

Perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara, pada akhirnya, akan menentukan tipologi ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik yang mempengaruhi stabilitas politik dan militer. Perubahan-perubahan tersebut, antara lain diawali oleh kebijakan global Amerika Serikat pasca terjadinya pemboman gedung WTC dan ancaman global terorisme yang juga bermain di level regional. Perubahan lainnya adalah semakin maraknya kejahatan transnasional yang mempengaruhi interaksi dan stabilitas antarnegara di kawasan. Perubahan lainnya adalah adanya potensi ancaman yang bersifat konvensional. Situasi empiris menjelaskan bahwa pola interaksi negara-negara di kawasan ini yang turut diwarnai beberapa tensi politik yang cukup tinggi. Tensi politik yang bermunculan disebabkan adanya kepentingan kedaulatan, seperti konflik klaim teritorial dan kepentingan politik yang mengarah pada terjadinya potensi perselisihan kepentingan atas wilayah laut. Besarnya potensi konflik tersebut memicu sikap negara-negara di kawasan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menggunakan pendekatan militeristik dan mulai mengembangkan (modernisasi) kemampuan persenjataan dan meningkatkan jumlah pasukan untuk menopang kapabilitas militernya dalam melakukan operasi militer. Perubahan tersebut pada akhirnya akan menentukan

tipologi ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik yang mempengaruhi stabilitas politik yang secara normatif akan menentukan cara pandang doktrin pertahanan dalam mengembangkan postur pertahanan sebuah negara yang ditujukan untuk merefleksi persaingan, ancaman dan konstelasi kekuatan sebagai respon terhadap lingkungan strategisnya. lingkungan strategis – baik pada tingkat global, regional, maupun nasional – akan mempengaruhi keseluruhan arah kebijakan politik luar negeri dan pertahanan nasional, termasuk pembangunan kemampuan diplomasi Indonesia, pembangunan kekuatan, serta kebijakan strategis apa yang akan diambil dan dioperasionalkan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis itu.

Struktur anarki dalam sistem internasional juga membentuk hubungan antarnegara yang mengarah pada terjadinya konflik. Hubungan konfliktual terjadi karena eksistensi sebuah negara adalah ancaman bagi negara lainnya. Dalam konteks ini, negara dapat melakukan atau mencapai keamanan dengan dua cara, yaitu dengan upaya internal, yaitu meningkatkan kapabilitas ekonomi, meningkatkan kekuatan militer, dan mengembangkan strategi dan upaya eksternal, yaitu memperkuat dan memperluas aliansi atau melemahkan dan meminimalisasi kekuatan lawan, sebagai bentuk dari maksimalisasi kekuatan atau strategi untuk mencapai makna *security* melalui pengembangan postur pertahanan.

Pengembangan postur pertahanan (kekuatan, kemampuan, dan gelar pasukan militer) dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pola pikir yang merefleksikan sekaligus mengimplementasikan rencana strategis yang ditujukan sebagai pertahanan negara yang diarahkan oleh doktrin pertahanan. Cara pandang doktrin pertahanan Indonesia belum merefleksi situasi dunia luar atau masih bersifat *inward-looking*. Dalam kasus Indonesia, cara pandang doktrin pertahanan yang menjadi arah kebijakan pertahanan masih berfokus pada bagaimana mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah saja berdasarkan ancaman internal dan invasi dari luar (penjajahan) dan tidak ditujukan pada bagaimana pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dengan memperjuangkan dan menjaga kepentingan nasional yang dapat ditujukan untuk mensejahterakan bangsa, serta menjaga keutuhan wilayah

dengan melakukan tindakan *balancing* yang dapat memberikan efek tangkal yang mampu meredam keinginan negara lain. Langkah *balancing* tersebut ditujukan untuk meningkatkan *power* Indonesia di mata negara lain, sehingga hal itu akan berimplikasi pada kemampuan Indonesia dalam menciptakan posisi tawar. Selain itu, doktrin pertahanan tersebut memang menjelaskan bahwa lingkup keamanan negara akan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategisnya, namun doktrin pertahanan tersebut justru tidak memberikan cara pandang dan arah kebijakan yang jelas bagaimana Indonesia perlu mengidentifikasi ancaman eksternal dan bagaimana strategi pertahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman eksternal tersebut dan bagaimana kekuatan militer dapat diimplementasikan sebagai strategi dalam menghadapi persaingan untuk mencapai kepentingan nasional. Pada akhirnya, cara pandang doktrin tersebut berimplikasi dan memiliki konsekuensi terhadap proses pengembangan postur pertahanan yang tidak merefleksikan perubahan lingkungan strategisnya. Situasi tersebut terlihat pada bagaimana pengembangan kekuatan alutsista Indonesia yang sama sekali tidak didukung oleh besaran alokasi anggaran pertahanan dan orientasi pengembangan kekuatan militer sama sekali tidak menyentuh pada alutsista yang mendukung Indonesia dalam melakukan operasi militer keluar batas nasional. Tidak adanya adaptasi teknologi alutsista yang dilakukan Postur Pertahanan Indonesia untuk kepentingan strategi militer dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun postur pertahanan, baik sebagai proteksi, mobilitas, komunikasi, dan intelijen dan pemahaman terhadap signifikansi dan fungsi teknologi dalam mengaplikasikannya ke dalam pengembangan postur pertahanan, membuat pengembangan postur pertahanan Indonesia tidak menggambarkan pada pentingnya melakukan pembangunan kekuatan militer yang harus terus mengalami peningkatan sebagai bagian dari strategi untuk merefleksikan perubahan lingkungan strategisnya. Di sisi lain, cara pandang doktrin pertahanan yang belum melihat interaksi ancaman eksternal dan kepentingan di luar batas nasional dan perlunya memfokuskan cara pandang yang mampu mengarah pada situasi di luar kawasan. Doktrin pertahanan Indonesia belum diarahkan pada pentingnya kemampuan doktrin untuk mendukung kebijakan luar negeri dan

menciptakan strategi pertahanan yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan dalam interaksi antarnegara, serta implementasi gelar pasukan sebagai strategi demi tujuan-tujuan politik melalui penempatan kekuatan yang ditempatkan pada wilayah-wilayah penting belum didukung kualitas dan kuantitas divisi yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan strategis dan faktor geografis. Situasi ini mencerminkan kemampuan gelar pasukan Indonesia belum mengarah pada pentingnya untuk menciptakan kemampuan komando, komunikasi dan sistem transportasi pasukan yang mengarah pada kesiapan untuk merefleksi dan menghadapi situasi di luar kawasan. Di sisi lain, kemampuan diplomasi Indonesia yang sama sekali tidak beranjak pada fungsi diplomasi untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara yang diarahkan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan usaha *balancing* untuk mencapai tujuan-tujuan politik di kawasan. Hal itu tercermin pada tidak adanya cara pandang langkah kebijakan pertahanan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan postur pertahanan Indonesia, melalui kesepakatan pertahanan dalam bentuk kerjasama pengaturan keamanan dan kerangka aliansi, serta proyeksi kekuatan yang hanya mengandalkan pertahanan 3 lapis yang sama sekali belum diarahkan keluar batas nasional. Hal tersebut tentu saja akan berimplikasi pada kemampuan Indonesia dalam menjaga kelangsungan eksistensi dan keberhasilan pencapaian kepentingan nasional sebagai strategi *balancing*.

Secara komprehensif, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat cara pandang doktrin pertahanan yang masih internal atau sama sekali belum ditujukan untuk perlunya memfokuskan cara pandang yang mampu mengarah pada situasi di luar kawasan. Doktrin pertahanan diarahkan pada pentingnya kemampuan doktrin untuk mendukung kebijakan luar negeri dan menciptakan strategi pertahanan yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan dan menghadapi dalam ancaman, persaingan, dan tantangan eksternal sebagai langkah *balancing* dalam interaksi antar negara dalam sebuah sistem internasional.

5.2 Implikasi Teoritis

Implementasi konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menjabarkan proses berpikir yang digunakan sebagai alat analisa dalam menjawab pertanyaan penelitian. Operasionalisasi konsep ini telah menuntun penulis dalam menganalisa bagaimana kondisi perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara dan implikasi doktrin pertahanan Indonesia terhadap postur pertahanan Indonesia periode 2001-2004. Cara pandang dan arahan yang menjadi poin utama dari konsep dan teori yang digunakan sebagai alat analisa ini telah memberikan ruang gerak bagi penulis untuk dengan leluasa menganalisa faktor dan indikator yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Teori ofensif-defensif dapat dipahami sebagai bentuk dan karakteristik cara pandang doktrin yang mempengaruhi kemampuan postur pertahanan atau aktualisasi atas kemampuan negara dalam merefleksi lingkungan strategisnya. Konsep lingkungan strategis digunakan sebagai gambaran terhadap potensi bentuk dan eskalasi konflik, penilaian potensi ancaman, dan penilaian kapabilitas yang harus dikembangkan. Konflik yang terjadi sebagai akibat dari faktor kekuatan militer yang didefinisikan sebagai ancaman eksternal, baik antarnegara bertetangga atau dalam kawasan regional yang cenderung dipengaruhi oleh atmosfer dan militer. Karena itu, peran konsep dan teori yang digunakan telah mampu memberikan gambaran, baik secara garis besar maupun spesifik, terhadap bagaimana menjawab pertanyaan penelitian dan pengujian hipotesis pada penelitian ini.

5.3 Implikasi Kebijakan

Melihat fakta empiris yang terjadi, terbukti bahwa postur pertahanan Indonesia masih sangat lemah dan belum merefleksi lingkungan strategisnya. Hal itu disebabkan oleh cara pandang doktrin pertahanan yang belum merefleksi situasi dan perubahan lingkungan strategisnya. Karena itu diperlukan perubahan cara pandang doktrin pertahanan yang ditujukan tidak hanya mengacu pada kondisi internal saja, namun perlu memperhatikan dinamika di luar batas nasional dan interaksi kompetisi

yang mengarah pada potensi konflik sebagai bagian dari pertahanan dan keamanan negara terhadap ancaman, tantangan dan persaingan yang bersifat eksternal.

Fungsi dokumen doktrin dan dokumen lainnya yang menjelaskan cara pandang dan arah kebijakan pada dasarnya merupakan pernyataan kebijakan pemerintah negara bersangkutan yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Dokumen-dokumen tersebut menjelaskan poin-poin kebijakan yang menjadi cara pandang sebuah negara yang mencerminkan bagaimana tujuan-tujuan politik dicapai melalui efek pengembangan postur pertahanan. Cara pandang doktrin pertahanan yang mempengaruhi bagaimana pengembangan postur pertahanan mesti benar-benar, selayaknya, merefleksi situasi di luar kawasan. Hal tersebut menjadi penting mengingat konsepsi kepentingan nasional tidak selalu berada dalam batas nasional sehingga hal tersebut memaksa negara untuk mampu melihat kompleksitas dan saling keterkaitan berbagai isu keamanan antarnegara.

Perlunya perubahan cara pandang doktrin pertahanan yang berorientasi keluar akan mempengaruhi proses pengembangan postur pertahanan sebagai sikap responsif tersebut ditujukan sebagai langkah preventif dan strategi *balancing* dalam menghadapi ancaman eksternal dan potensi konflik yang berkembang melalui pengembangan kekuatan militer yang difungsikan sebagai instrument politik dalam mencapai keamanan untuk mencapai kepentingan nasional, yang pada akhirnya akan membuat Indonesia memiliki kemampuan penangkalan dan kekuatan tawar dalam persaingan dan konfliktual yang mewarnai interaksi antarnegara.